



---

*CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. This commentaries serves as a medium for experts to disseminate knowledge and share perspectives in two languages – Bahasa Indonesia and English, enabling a diverse readership to engage with the content. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia. Please contact the editorial team for any enquiries at [publication@csis.or.id](mailto:publication@csis.or.id)*

---

CSIS Commentaries CSISCOM02224

September 26<sup>th</sup>, 2024

# Jokowinomics: Kegagalan Peran Besar Negara

Deni Friawan

*Peneliti Senior, Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia*

[deni.friawan@csis.or.id](mailto:deni.friawan@csis.or.id)

Adinova Fauri

*Peneliti, Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia*

[adinova.fauri@csis.or.id](mailto:adinova.fauri@csis.or.id)

## Pendahuluan

Setelah *boom* komoditas dan berakhirnya kebijakan *Quantitative Easing* dari Amerika Serikat di awal 2013, ekonomi Indonesia melambat pada termin kedua Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan pertumbuhan turun dari rata-rata 6,14% (2010-2012) menjadi 5,28% (2013-2014). Kualitas pertumbuhan masa kepemimpinan SBY juga dipertanyakan. Masa itu juga ditandai ketimpangan ekonomi antar daerah dan kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Tingkat kemiskinan

memang turun dari 16.7% pada 2004 menjadi 11% pada 2014 tapi kemiskinan di Papua dan Papua Barat masih tinggi, yaitu 28% dan 26% pada 2014.

Indonesia juga mengalami deindustrialisasi prematur dan penurunan produktivitas, kalah dibanding negara tetangga. Kontribusi sektor manufaktur turun dari 28% pada 2004 menjadi 21% pada 2014. Penurunan ini melemahkan ekonomi pasca krisis keuangan Asia 1997-98. Stagnansi sektor manufaktur (deindustrialisasi), yang pada masa Orde Baru berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja Indonesia, menjadi faktor utama rendahnya penciptaan lapangan kerja berkualitas di Indonesia (*jobless growth*). Masalah struktural seperti kurangnya infrastruktur, birokrasi dan regulasi rumit, ketidakpastian hukum, kualitas SDM rendah, pasar tenaga kerja tidak fleksibel, dan *high-cost economy* telah menghambat investasi dan daya saing ekspor.

Untuk mengatasinya, Pemerintahan Jokowi menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi yang menekankan peran besar negara melalui BUMN, dikenal sebagai *Jokowinomics*. Fokusnya adalah mempercepat dan meratakan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas industri. Seperti era Soeharto, peran BUMN sangat besar dalam ekonomi kapitalisme negara (*state capitalism*) ala Jokowi. *Jokowinomics* juga dipengaruhi oleh kepemimpinan Jokowi yang berorientasi pada hasil, meski harus melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas, berkolusi dengan oligarki, serta mengakali aturan dan merusak institusi reformasi dan demokrasi.

Tulisan ini akan membahas kebijakan dan program pembangunan ekonomi utama pada era Jokowi serta dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Selama satu dekade terakhir, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, program perlindungan sosial, dan hilirisasi industri menjadi fokus kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi. Selain itu, tulisan ini juga menggarisbawahi ambisi pembangunan cepat melalui peran besar negara gagal menciptakan pertumbuhan berkualitas, tapi malah menimbulkan utang pemerintah dan BUMN yang besar, kerusakan lingkungan, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan pelemahan institusi-institusi reformasi dan demokrasi.

## **Peran Negara Yang Semakin Besar**

Kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi menekankan peran besar negara dalam perekonomian. Tiga dari sembilan agenda aksi dalam visi-misi Nawa Cita (2014-2019) menekankan pentingnya kehadiran negara, yang menjadi dasar kebijakan ekonomi Jokowi selama sepuluh tahun terakhir. Seperti yang dijanjikan saat kampanye, Jokowi berambisi mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% agar Indonesia bisa menjadi negara maju sebelum era populasi menua. Untuk mencapainya, ia menjalankan program prioritas seperti percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, program perlindungan sosial, dan hilirisasi industri.

Penguatan peran negara melalui percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama di era Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur ini penting untuk menggerakkan ekonomi daerah dan menunjukkan komitmen Jokowi terhadap pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Untuk ini, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dibentuk sebagai unit koordinasi dan berperan menyelesaikan segala isu (*bottleneck*) yang muncul dari pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hingga Juli 2024, terdapat 233 PSN, yang di antaranya meliputi pembangunan tol trans Sumatera, revitalisasi kilang minyak, pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW, pembangunan kawasan industri, palapa ring broadband, dan lain-lain, dengan total nilai investasi sebesar Rp6.246,7 T.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Firman Hidranto, "233 Proyek Strategis Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024", Indonesia.go.id, 2 Agustus 2024, Indonesia.go.id - 233 Proyek Strategis Nasional Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024.

Penguatan peran negara melalui percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama di era Presiden Jokowi di Indonesia, terlihat dari mayoritas PSN yang dijalankan. Dengan alasan kecepatan, pemberian proyek-proyek pembangunan infrastruktur kepada BUMN seringkali dilakukan melalui proses penugasan langsung, tanpa melalui mekanisme pasar dan proses lelang yang baik yang memungkinkan terjadinya kompetisi yang sehat dan partisipasi pihak swasta. Dengan menyerahkan kepada BUMN, dua masalah utama dapat lebih mudah diselesaikan: pembebasan lahan yang mahal dan memakan waktu, serta pembiayaan proyek yang kurang ekonomis bagi swasta.

Selain pembiayaan yang berasal dari bank-bank BUMN, pemerintah juga terus menyuntik dana melalui Penyerahan Modal Negara (PMN) untuk meringankan beban pembiayaan PSN bagi BUMN dan mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur. Selama lima tahun terakhir (2020-2024), misalnya, dana alokasi PMN BUMN secara kumulatif mencapai Rp223.9 triliun dan pada 2025 usulan PMN BUMN berkisar Rp44,2 triliun.<sup>2</sup>

Selain pembangunan infrastruktur, fokus kebijakan Pemerintahan Jokowi selanjutnya diarahkan pada perbaikan regulasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Di periode pertama pemerintahannya, Jokowi mengidentifikasi terdapat 42 ribu peraturan yang bermasalah dan tumpang tindih dan setengah diantaranya direncanakan untuk dipangkas pada tahun 2023.<sup>3,4</sup> Berbagai langkah kebijakan reformasi regulasi pun dikeluarkan, seperti: 16 paket kebijakan ekonomi, wacana pembentukan Badan Regulasi Nasional, serta pencabutan ratusan regulasi baik ditingkat pusat maupun daerah.<sup>5</sup> Terakhir, pengesahan UU Cipta Kerja, yang juga dikenal sebagai omnibus law, merupakan salah satu pencapaian utama dalam kebijakan transformasi regulasi di era Jokowi.

Namun, hingga kini belum ada mekanisme yang efektif untuk reformasi regulasi yang sistematis. UU Cipta Kerja, yang bertujuan meningkatkan investasi dan lapangan kerja, tidak berhasil mempertahankan semangat reformasinya untuk dilaksanakan dalam berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri di bawahnya. Banyak dari aturan baru yang dibentuk malah memperburuk iklim berusaha di Indonesia, seperti terlihat di bidang perdagangan, investasi serta ketenagakerjaan. Di sisi lain UU ini juga dianggap sebagai simbol resentralisasi kebijakan, dengan memindahkan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pusat.

Selanjutnya, Pemerintahan Jokowi juga menerapkan kebijakan industrial yang aktif untuk mendorong industri manufaktur dan daya saing. Untuk ini, kebijakan TKDN dan hilirisasi diterapkan untuk membuka lapangan kerja, mendiversifikasi ekonomi, dan turut berperan dalam rantai pasok global. Melanjutkan kebijakan SBY, TKDN diwajibkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pusat dan daerah.<sup>6</sup> Sementara itu, Sejak 2020 kebijakan penangguhan pajak,

---

<sup>2</sup> Leoni Susanto. 2024. "Infografik: Lompatan Dana PMN BUMN".

<https://katadata.co.id/infografik/6690ccb2a5d5f/infografik-lompatan-dana-pmn-bumn>

<sup>3</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Sambutan Presiden Jokowi pada Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat, 8 September 2017", Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 9 September 2017, <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-jokowi-pada-seminar-internasional-ikatan-notaris-indonesia-di-bali-nusa-dua-convention-center-bali-jumat-8-september-2017/>

<sup>4</sup> Fitri N Heriani, "Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Peraturan", Hukumonline.com, 12 September 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menata-regulasi--antara-ego-sektoral-dan-tumpang-tindih-peraturan-lt5b98b66ff10a7/?page=all>

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Aturan mengenai kewajiban TKDN ini tercantum pada PP No. 29/2018, Perpres No 16/2018 (yang diamandemen oleh Perpres No.12/2021) dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/2016, No.2/2014 dan No. 2/2014.

pengurangan pajak pendapatan korporasi, pelarangan ekspor mineral mentah, dan kewajiban pemrosesan logam seperti nikel, timah, dan tembaga juga kembali diterapkan untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah domestik. Kedua kebijakan ini pada sifatnya memiliki esensi yang sama, yaitu upaya untuk meningkatkan nilai tambah domestik secara paksa.

Tidak hanya berfokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, penguatan peran negara juga terlihat dalam kebijakan subsidi dan perlindungan sosial, termasuk berbagai program pemberantasan kemiskinan. Kebijakan yang bersifat *pro-poor* sangat terlihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan seperti program bantuan dan jaminan sosial (PKH, KIP, JKN, BNPT, JKP dan lain-lain). Pada saat Pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia pun melakukan peningkatan alokasi perlindungan sosial serta berbagai penyesuaian insentif fiskal, sehingga melonggarkan aturan batas defisit APBN dari maksimal 3% menjadi 6%.

Selanjutnya, karena alasan ketidakpastian ekonomi global, perlambatan ekonomi China, dan dampak fenomena El Nino, di akhir Oktober 2023 hingga awal 2024, pemerintahan Jokowi juga menambah dan memperluas anggaran bantuan sosial (Bansos). Secara keseluruhan alokasi anggaran perlindungan sosial untuk 2024 mencapai Rp496,8 triliun. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran 2023 yang sebesar Rp433 triliun dan bahkan tetap lebih tinggi jika dibandingkan pada masa pandemi Covid-19, yaitu Rp468,2 triliun (2021) dan Rp460,6 triliun (2022)<sup>7</sup>. Subsidi dan perlindungan sosial ini ditengarai oleh banyak pihak telah digunakan untuk pemenangan paslon Capres-Wapres tertentu.

Terakhir, untuk mengontrol tingkat inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintahan Jokowi juga terus mempertahankan kebijakan subsidi energi yang besar. Meskipun setelah reformasi energi pada awal periode pertama pemerintahannya besaran subsidi BBM sempat turun dari Rp341,8 triliun pada 2014 menjadi Rp119,1 triliun di 2015 dan Rp97,7 triliun di 2017, subsidi energi kembali naik menjadi Rp171,9 triliun di 2022. Beban subsidi energi yang sesungguhnya di tanggung oleh pemerintah sebenarnya lebih besar lagi jika turut memasukkan subsidi implisit dalam bentuk kompensasi energi. Total subsidi dan kompensasi energi meningkat dari Rp144,3 triliun pada 2019 menjadi Rp551,2 triliun pada 2022, lalu turun menjadi Rp329,9 triliun pada 2024, sekitar 10% dari total pengeluaran pemerintah pusat atau 1,5% dari PDB.

## **Pencapaian dan Kegagalan**

Selama satu dekade terakhir, pemerintahan Jokowi telah berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi tetap terjaga melalui kebijakan *macro prudential* dan disiplin fiskal yang baik. Walaupun ketidakpastian ekonomi global meningkat akibat konflik geopolitik dan perang dagang USA-China dan krisis kesehatan Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sebesar 4,13 %, lebih baik dibanding banyak negara lain di dunia, tapi lebih rendah dibanding periode pemerintahan sebelumnya (5,72%). Selain itu, tingkat inflasi selama masa pemerintahan Jokowi juga dapat dijaga pada level yang rendah, rata-rata hanya 3,47% per tahun, bahkan sempat menyentuh level terendah dalam sejarah Indonesia, yaitu 1,6% pada 2021.

Sejalan dengan fokus pembangunan infrastruktur, Pemerintahan Jokowi juga telah berhasil meningkatkan penyediaan berbagai infrastruktur fisik di seluruh Indonesia. Selama satu dekade, pemerintahan Jokowi telah berhasil membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter

---

<sup>7</sup> Viriya Singgih. 2024. "Politisasi Bansos Dinilai Kian Masif Jelang Pilpres 2024-Bawaslu Sudah Memberikan Imbauan Kepada Presiden". *BBC News Indonesia*, 30 Januari 2024.  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpw7enedn39o#:~:text=BBC%20News%20Indonesia.%2030%20Januari%202024.%20Presiden%20Joko%20Widodo>

jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baur, serta 43 bendungan dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Berkat pembangunan infrastruktur yang masif tersebut, data BAPPENAS menunjukkan bahwa biaya logistik turun dari 24% pada 2020 menjadi 14% pada 2023.

Namun, pencapaian tersebut harus dibayar mahal secara ekonomi dan politik. Peningkatan anggaran belanja negara yang tidak seimbang dengan penerimaan pajak menyebabkan defisit fiskal yang besar dan utang pemerintah yang terus meningkat. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, utang pemerintah naik dari Rp2.795 triliun pada Q1-2015 menjadi Rp8.262 triliun pada Q1-2024, dengan rasio utang terhadap PDB naik dari 25,05% menjadi 38,87%. Utang BUMN non-keuangan, terutama BUMN Karya, juga naik signifikan dari Rp506 triliun pada Q1-2015 menjadi Rp1.035 triliun pada Q1-2024.

Meskipun secara proporsi terhadap PDB, utang pemerintah masih berada dalam posisi yang aman, beberapa hal perlu mendapatkan perhatian. Sebagian dari utang baru yang dikeluarkan dipergunakan untuk membayar bunga dan pokok utang, seperti ditunjukkan oleh defisit neraca anggaran primer, yang menyebabkan naiknya proporsi utang terhadap PDB. Utang pemerintah dan BUMN juga cenderung berbiaya tinggi, dengan bunga kupon berkisar pada tingkatan 7%. Ini menyebabkan sebagian dari penerimaan pemerintah harus dipergunakan untuk membayar bunga utang tersebut mengurangi porsi untuk pengeluaran yang lainnya. Selain itu tingginya bunga juga menyebabkan tingginya biaya modal dan suku bunga di Indonesia, serta terjadinya efek *crowding-out* likuiditas dalam perekonomian Indonesia.

Investasi besar untuk infrastruktur ini juga tidak sebanding dengan hasilnya karena proyek sering dikerjakan terburu-buru, tanpa perencanaan matang, dan beberapa terindikasi korupsi. Akibatnya, banyak infrastruktur berkualitas rendah yang mudah rusak dan memerlukan biaya perbaikan yang besar. Beberapa proyek, seperti Bandara Kertajati dan Kereta Api Cepat *Woosh* Jakarta-Bandung, bahkan belum termanfaatkan dengan baik dan malah merugikan. Investasi pemerintah yang dibiayai utang juga menyebabkan *crowding out effect* terhadap sektor swasta karena dominasi BUMN dan sulitnya akses kredit murah. Inefisiensi ini tercermin pada tingginya ICOR, yang naik dari 4,4 (2001-2006) menjadi 6,8 (2016-2022).

Selanjutnya, dampak kebijakan hilirisasi SDA terhadap perekonomian pun masih terbatas dan cenderung merusak lingkungan. Kebijakan ini, terutama di sektor nikel, memang telah berhasil meningkatkan FDI dan ekspor produk logam olahan. Ekspor nikel olahan naik dari US\$9,3 miliar pada 2019 menjadi US\$33,8 miliar pada 2022, dan investasi asing di industri logam naik dari US\$3.558 juta menjadi US\$10.961 juta. Namun hasilnya belum terlihat pada daya saing produk dan pengembangan industri di Indonesia. Kebijakan ini malah meningkatkan emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan penggunaan PLTU Batubara. Manfaatnya juga lebih banyak dinikmati oleh oligarki dan investor asing karena berbagai insentif dan pembebasan pajak. Selama delapan tahun terakhir, hanya 200 ribu lapangan kerja yang tercipta dari pembangunan smelter dan industri pengolahan nikel, bauksit, dan tembaga.

Laju de-industrialisasi prematur dan pemutusan hubungan kerja (PHK) pun masih terus berlangsung walaupun kebijakan hilirisasi dan Undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) telah dijalankan. Persentase nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB cenderung mengalami penurunan dari 21% pada 2015 menjadi 18,7% pada 2023. Meskipun investasi di sektor manufaktur meningkat dengan pesat, dengan pertumbuhan hingga 10% setiap tahunnya, tetapi pertumbuhan nilai tambah sektor ini hanya berada di kisaran 4,5%, di bawah dari pertumbuhan ekonomi.

Alih-alih meningkatkan kapasitas industri dan daya saing Indonesia, UU Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dan menarik investasi asing malah hanya menarik investasi yang lebih padat modal dan belum bisa memberikan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Kondisi perekonomian dan regulasi yang memberatkan bahkan membuat sulit dunia usaha untuk mempertahankan pekerja mereka. Sejak Januari hingga Agustus 2024 saja, Sekertaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi menyatakan bahwa nyaris 46 ribu pekerja yang terkena PHK<sup>8</sup>, sangat besar jika dibandingkan dengan lapangan kerja yang mampu disediakan oleh industri hilir dari pengolahan SDA.

Meskipun program peningkatan SDM, subsidi, dan perlindungan sosial telah memperbaiki beberapa indikator sosio-ekonomi, kualitas peningkatannya masih terbatas. Dalam 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan hanya turun dari 11,25% menjadi 9,02% dan Jumlah orang miskin juga masih besar, yaitu 25,22 juta jiwa. Selama 2019-2024 proporsi kelas menengah malah berkurang 21,45% menjadi hanya 17,13%, atay turun sebanyak 9,48 juta jiwa. Prevalensi stunting juga masih tinggi, yaitu 21,5%, meskipun telah turun dari 37,2%. Partisipasi pendidikan meningkat, tetapi kualitasnya masih terbatas. APK SMA/SMK/MA untuk kuintil 1 memang naik dari 59,74% menjadi 75,89%, dan partisipasi pendidikan tinggi meningkat dari 25,76% menjadi 31,45%. Namun, data PISA 2022 menunjukkan lebih dari tiga perempat anak berusia 15 tahun gagal memenuhi kemahiran minimum (level 2) dalam matematika dan membaca.

## Penutup

Selama 10 tahun période pemerintahannya, Presiden Jokowi telah menerapkan kebijakan ekonomi yang menekankan peran besar negara melalui BUMN untuk mempercepat dan meratakan pembangunan infrastruktur dan industri. Kebijakan ekonominya berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi regulasi, program perlindungan sosial, dan hilirisasi industri. Berbagai kebijakan tersebut telah berhasil mempertahankan stabilitas makroekonomi, meningkatkan penyediaan berbagai infrastruktur fisik di seluruh Indonesia, dan memperbaiki beberapa indikator sosio-ekonomi Indonesia.

Namun demikian, berbagai kebijakan ekonomi tersebut telah gagal menciptakan pertumbuhan berkualitas tapi malah menimbulkan utang besar, kerusakan lingkungan, tata kelola pemerintahan yang buruk, dan pelemahan institusi reformasi dan demokrasi. Corak kepemimpinan dan ambisi Jokowi yang terlalu berorientasi pada hasil dan pemberian peran negara, khususnya BUMN, yang terlalu besar dalam perekonomian telah membuat prinsip-prinsip perdagangan bebas (*fair competition*) dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang efisien menjadi tidak diidahkan. Lebih parah lagi, hal tersebut juga telah membuka jalan untuk praktek-praktek aktivitas perburuan rente (*rent seeking activities*) atau kolusi antara pemerintah dan oligarki dengan mengakali aturan dan merusak institusi-institusi reformasi dan demokrasi.

Belajar dari pengalaman sepuluh tahun kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi, pemerintahan baru perlu secara seksama memikirkan ulang peran negara yang tepat dalam perekonomian. Sebaiknya, hindari peran dan keterlibatan negara/pemerintah yang terlalu besar/eksesif yang tidak perlu dalam perekonomian. Perlu juga adanya pemisahan yang tegas antara pembuat kebijakan dengan pelaku usaha agar terhindar dari kebijakan yang hanya menguntungkan *vested interest* tertentu dengan biaya yang ditanggung oleh masyarakat luas. Kebijakan ekonomi harus selalu mempertimbangkan efisiensi dan prinsip-prinsip dasar ekonomi yang baik (*market base consideration*).

---

<sup>8</sup> Gibran Khyirah Tavip. 2024. "46 Ribu Pekerja Kena PHK Sejak Januari 2024, Terbanyak di Daerah Ini". Okexone, Kamis 29 Agustus 2024. <https://economy.okezone.com/read/2024/08/29/320/3055850/46-ribu-pekerja-kena-phk-sejak-januari-2024-terbanyak-di-daerah-ini>

Lebih lanjut, pengambilan kebijakan juga tidak dilakukan secara *Ad Hoc* dan instant, tapi harus dipikirkan dan direncanakan dengan matang dan seksama). Orientasi pada hasil memang penting, tapi proses dan *evidence-based* dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi juga tidak kalah pentingnya. Kualitas institusi public dan swasta/institusi politik dan ekonomi berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, tidak hanya fokus pada modal fisik (infrastruktur), tenaga kerja dan sumber daya manusia.

Untuk ini, negara atau pemerintah sebaiknya lebih diposisikan sebagai alat untuk memperbaiki kegagalan pasar (*market failure*) dan bukannya mengambil alih peran mekanisme pasar. Negara sebaiknya lebih fokus membangun dan menyediakan berbagai peraturan dan institusi yang dapat mendukung peran serta pihak swasta dan menjamin mekanisme pasar ini dapat berjalan dengan baik. Dibanding turun langsung dan aktif sebagai pelaku ekonomi, pemerintahan baru sebaiknya lebih fokus pada upaya-upaya perbaikan birokrasi dan aturan yang rumit, menjamin kepastian hukum, perbaikan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur fisik yang memiliki dampak besar bagi perekonomian, tapi tidak mampu dilakukan oleh pihak swasta.

**CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160Tel:  
(62-21) 386 5532 | Fax: (62-21) 384 7517 | [csis.or.id](http://csis.or.id)**

**Please contact the editorial team for any enquiries at  
[publication@csis.or.id](mailto:publication@csis.or.id)**